

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap data dan analisis yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, serta merujuk pada penelitian terdahulu yang relevan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), upah minimum, dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan TPT dan peningkatan upah minimum memiliki dampak yang kompleks terhadap pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ibnu Khaldun mendefinisikan Pengangguran terbuka adalah tingkat indikator kemerosotan suatu peradaban *umran*, karena tenaga kerja yang menganggur berarti hilangnya sumber pertumbuhan dan kemakmuran. Pada tahun penelitian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam periode 2021 hingga 2024 relatif mengalami penurunan dari 6,49% pada Agustus 2021 menjadi 4,91% pada Agustus 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja pasca-pandemi COVID-19. Berbagai program pemulihan ekonomi yang diluncurkan, seperti penciptaan lapangan kerja, padat karya, dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM), berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran. Namun, meskipun TPT menurun, banyak pekerjaan yang diciptakan berada di sektor informal,

yang sering kali ditandai dengan pendapatan yang rendah, kurangnya perlindungan sosial, dan ketidakpastian kerja. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan TPT tidak selalu diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Upah merupakan imbalan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas keuntungan yang dihasilkan dari suatu pekerjaan atau dalam bahasa arab dikenal al-ujrah. Pada tahun penelitian Upah Minimum di Indonesia relatif mengalami kenaikan terus menerus dari Rp2.687.723,69 pada tahun 2021 menjadi Rp3.113.359,85 pada tahun 2024. Kenaikan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi yang meningkat. Namun, tantangan tetap ada, terutama di sektor informal, di mana sekitar 57% pekerja belum menikmati perlindungan upah minimum sepenuhnya. Penelitian oleh Simanjuntak pada tahun 2020 menunjukkan bahwa meskipun upah minimum meningkat, dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan belum merata, terutama di sektor informal. Banyak pekerja masih terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial, yang mengakibatkan kesenjangan antara pekerja formal dan informal semakin lebar.
3. Kemiskinan merupakan permasalahan perekonomian yang disebabkan oleh sistem ekonomi yang tidak adil. Pada tahun penelitian tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari 10,14% pada Maret 2021 menjadi 8,57% pada September 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pemerintah

dalam mengatasi kemiskinan, termasuk program bantuan sosial dan investasi di sektor padat karya. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan di daerah pedesaan dan di kalangan pekerja informal yang tidak memiliki jaminan sosial. Penelitian oleh Bappenas pada tahun 2022 mencatat bahwa meskipun angka kemiskinan menurun, masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan, terutama di daerah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pemerintah dalam memberikan bantuan sosial dan meningkatkan investasi di sektor padat karya mulai membuahkan hasil, tantangan tetap ada.

4. Keterkaitan TPT terhadap kemiskinan menurut Ibnu Khaldun terletak pada pembangunan menurun maka jumlah pekerjaan juga menurun, yang menyebabkan rezeki pun berkurang dan akhirnya memicu stagnasi ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan bisa timbul karena ketiadaan aktivitas kerja yang produktif karena kemunduran ekonomi. Kemudian pada tahun penelitian dari tahun 2021-2024 berdasarkan pengujian statistik, hasil uji t menunjukkan bahwa TPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan koefisien regresi 1.2535 dan probabilitas $0.0002 < 0.05$. Ini berarti semakin tinggi TPT, semakin banyak orang yang mengalami kemiskinan. Penelitian oleh Widiastuti dan Rahman pada tahun 2022 mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa penurunan TPT tidak selalu berdampak signifikan pada pengurangan kemiskinan, terutama jika pekerjaan yang diciptakan tidak layak. Oleh karena itu, penurunan TPT seharusnya diiringi dengan penciptaan pekerjaan yang layak dan produktif.

5. Keterkaitan upah minimum terhadap kemiskinan menurut Ibnu Khaldun terletak pada pemberian upah yang adil sehingga mendorong pekerja untuk bekerja secara produktif. Ketidakadilan dalam pemberian upah dapat mengakibatkan penurunan semangat kerja dan merusak produktivitas sehingga dapat mengakibatkan kemiskinan. Pada tahun penelitian dari tahun 2021-2024, berdasarkan pengujian statistik hasil uji t menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan koefisien $4.51e-06$ dan probabilitas $0.0000 < 0.05$. Kenaikan upah minimum dapat mengurangi kemiskinan, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Penelitian oleh Klein (2021) menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum dapat mengurangi kemiskinan, tetapi hanya jika diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja. Jika tidak, kenaikan upah minimum dapat menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah karyawan.
6. Berdasarkan pengujian statistik hasil uji F menunjukkan bahwa TPT dan upah minimum secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan nilai F-statistic sebesar 12.56362 dan probabilitas 0.000000. Ini menunjukkan bahwa kedua variabel ini saling berinteraksi dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan, dan kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan kedua faktor ini secara bersamaan untuk mencapai pengurangan kemiskinan yang lebih signifikan.

B. Saran

1. Saran bagi Akademik:

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai hubungan antara TPT, upah minimum, dan kemiskinan. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model analisis yang lebih kompleks dengan mempertimbangkan variabel tambahan seperti inflasi, pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang determinan kemiskinan di Indonesia.

2. Saran bagi Penelitian Selanjutnya:

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis longitudinal yang lebih mendalam untuk memahami dinamika jangka panjang antara TPT, upah minimum, dan kemiskinan. Selain itu, penelitian dapat memperluas cakupan dengan membandingkan data antar daerah atau negara untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai kebijakan ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap kemiskinan.